

Jumlah Sekolah di Batuaji Terbatas

Camat Kumpulkan Kepsek, Bahas Penerimaan Siswa Baru

BATUAJI (BP) - Kecamatan Batuaji mengumpulkan seluruh kepala sekolah negeri baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di wilayah Batuaji, Kamis (19/4). Rapat tersebut membahas persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Juni mendatang.

"Pembahasannya masih sebatas jumlah sekolah dan berapa daya tampung pada setiap sekolah," ujar Camat Batuaji Ridwan Afandi kepada *Batam Pos* kemarin.

Terkait jumlah sekolah, Ridwan mengaku sangat minim. Sekolah dasar saja ada sekitar tujuh sekolah, SMP empat sekolah, dan SMK hanya satu sekolah. Menurutnya, jumlah sekolah yang ada sekarang, kemungkinan tidak akan mampu menampung semua jumlah siswa yang ingin mendaftar di sekolah negeri di wilayah Batuaji.

"Maka untuk menghindari masalah saat PPDB nanti, kita rapatkan di sini, solusinya seperti apa nantinya," kata Ridwan.

Apalagi, sambung Ridwan,

masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas belajar. Bahkan ada yang belum memiliki gedung sekolah sendiri. Karenanya, sekolah tersebut hanya akan membuka pendaftaran untuk satu kelas saja pada PPBD nanti.

"Memang ada tadi beberapa kepala sekolah yang mengeluhkan kekurangan kelas dan tenaga pengajar, cuma itu bukan domain kita. Akan tetapi hal itu juga akan kita sampaikan kepada pimpinan nantinya. Yang jelas kita masih mengumpulkan data-data sekolah di wilayah Batu-



F. DALIL HARAHAP/BP

Ridwan Afandi

aji ini dulu," jelasnya.

Mengenai zonasi, pihaknya belum bisa memastikan. Sebab usai rapat kemarin, ia masih

Jumlah Sekolah di Batuaji Terbatas

Sambungan dari hal 9

berkoordinasi dengan kelurahan, RT/RW setempat, dan tokoh masyarakat. "Ini masih rapat pertama. Untuk zonasi dan lain sebagainya belum (dibahas)," ucapnya.

Sebelumnya, masalah PP-DB juga dialami SDN 008 Batuaji. Tahun ini rencananya hanya membuka satu kelas lantaran sekolah tersebut masih menumpang di gedung milik SDN 002 Batuaji. Lokal yang disediakan pihak SDN 002 untuk SDN 008 terbatas. Dikhawatir jika tahun ajaran baru nanti mereka akan kewalahan mengatur lokal belajar untuk murid baru.

"Tahun ini hanya terima 32 murid saja, sudah segitu saja," ujar Kepala SDN 008 Batuaji Kamaliah.

Dia mengatakan selama ini 260 anak didiknya memang belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal seperti sekolah lain. Pihaknya juga sudah cukup kewalahan mengatur jadwal belajar murid mereka. Karena keterbatasan ruangan belajar tersebut, pihaknya harus

menerapkan sistem belajar tiga shift agar seluruh murid bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Murid kelas satu yang terdiri dari dua rombongan belajar (rombel) masuk pukul 07.00 WIB hingga pukul

10.00 WIB. Sedangkan murid kelas dua yang juga dua rombel belajar mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Selanjutnya murid kelas tiga dan kelas empat dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. (une)

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

1. PENGADAAN DAN PENGGANTIAN CB 150KV DI GI TG.SENKLUANG & GI BATU BESAR
2. PENGADAAN DAN PEMASANGAN DS 150KV DI GI SEI HARAPAN
3. PENGADAAN DAN PENGGANTIAN CT 150KV & LIGHTING ARRESTER DI GI TG.SENKLUANG

Nomor : 17.PM/DAN.02.02/PROC/2018

Sehubungan akan dilakukan Pelelangan Terbuka pengadaan tersebut diatas di PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) dengan Pascakuualifikasi, PROCUREMENT MANAGEMENT PT PLN Batam yang berkedudukan di Jl. Engku Putri No. 3 Batam Centre - Batam, mengundang penyedia barang & jasa mengikuti Pelelangan pekerjaan tersebut di atas.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan/RKS dilakukan pada :

Tanggal/Waktu : 20 April 2018 Jam 08.00 - 15.00
23 s.d 24 April 2018 Jam 08.00 - 16.30
25 April 2018 Jam 08.00 - 10.00

Tempat : Kantor PT PLN Batam Lt. 5, Jl. Engku Putri No. 3 Batam Centre - Batam

Syarat-syarat pendaftaran :

1. Menyerahkan copy Surat Ijin Usaha Industri dan atau Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan kualifikasi non kecil;
2. Menyerahkan copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) Bidang Transmisi Tenaga Listrik yang masih berlaku dengan kualifikasi minimal "Menengah";
3. Menyerahkan copy Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berkaitan pekerjaan pemasangan Circuit Breaker (CB)/ DS/ CVT/LA / Peralatan 150 KV dalam 3 tahun terakhir;
4. Menyerahkan Surat Kuasa asli bermaterai dan fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa bila pendaftaran oleh orang yang ditunjuk mewakili perusahaan;
5. Mendaftarkan diri ke PROCUREMENT MANAGEMENT PT PLN Batam Lantai 5;
6. Membayar biaya penggandaan dokumen sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Rapat Penjelasan Dokumen Pelelangan/RKS dilaksanakan pada Rabu, 25 April 2018 Jam 10.15 WIB di PT PLN Batam, Jl. Engku Putri No.3 Batam Center - Batam.

*Dihadiri oleh Direktur Utama/Pemimpin Perusahaan atau dapat diwakilkan staf dengan membawa dan menyerahkan Asli Surat Kuasa dari Direktur Utama/Pemimpin Perusahaan (Pemberi Kuasa) yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- yang dilengkapi dengan fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa (jika diwakilkan) Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Batam, 20 Maret 2018

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
PROCUREMENT MANAGEMENT

Gedung PT PLN Batam Lantai 5 Jalan Engku Putri No. 03 Batam Centre Batam-29431
Telp. 0778-463150,
website : www.plnbatam.com

Dapat Lahan 6x10 Meter

Relokasi Warga Ruli Baloi Kolam

BENGGONG (BP) - Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku hingga kini belum mengetahui titik relokasi atau Kaveling Slap Bangun (KSB) untuk memindahkan warga Baloi Kolam. Ia masih menunggu keputusan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Seperti diketahui, Baloi Kolam akan dikembangkan menjadi ikon Kota Batam. Maka warga yang kini mendiami wilayah itu akan dipindahkan ke daerah lain.

"Kalau sudah ada dan oke, baru kita relokasi," kata Rudi saat dijumpai di Bengkong, kemarin.

Ia mengatakan, setelah BP Batam menentukan titik relokasi, pihaknya akan turun langsung memverifikasi, termasuk kesesuaian kebutuhan kaveling warga dan lahan yang disediakan. Tentu tak hanya menentukan lokasi, lahan tersebut harus dipastikan statusnya dalam sebuah surat. Dengan kata lain, harus ada hitam putih antara BP Batam dan Pemko Batam.

"Kalau BP Batam serahkan, daerahnya mana? Kita verifikasi, cukup lahannya, baru kita pindahkan warga Baloi Kolam itu," ucap dia.

Ia menegaskan walau belum mengetahui titik kavelingnya, bukan berarti lahan itu tidak ada. Hanya saja, kini Pemko Batam menunggu BP Batam menyediakan lahan-lahan tersebut. "Jangan pernah bilang tidak ada, nanti ribut," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, kepastian adanya lahan juga disebut langsung oleh Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dalam suatu kesempatan rapat bersama Pemko Batam. "Dalam rapat beliau *ngomong* ketersediaan lahan itu. Yang jelas ada kaveling untuk warga kami, laksanakan verifikasi, baru kami bergerak," Rudi menegaskan.

Menurutnya, satu kaveling nanti berukuran 6 x 10 meter. Dalam penyiapannya, tidak dalam satu lokasi, namun tersebar di beberapa lokasi di Batam. "Yang jelas, kalau ada lahan kita jalan, tak ada tidak jalan, *simple*. Kita tunggu BP Batam, mereka harus sanggup."

Soal relokasi warga Baloi Kolam ini, Rudi juga menyinggungnya dalam acara sosialisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) di Best Western Panbil, Rabu (18/4) lalu, yang juga dihadiri Kepala

BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.

"Baloi Kolam akan jadi ikon Kota Batam. Kami sudah bersepakat satu rumah dapat Rp 15 juta dan kaveling sekitar 6 kali 10 meter dan tambahkan rumah ibadah," terangnya.

Relokasi nanti, Rudi meminta bantuan TNI, polisi, dan unsur pengamanan lainnya untuk ikut serta memindahkan para warga. Pemindahan juga diusahakan tahun ini untuk mengejar program sertifikasi gratis. Sehingga kelak selain dapat lahan, warga juga mendapat legalitas atas lahannya tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan sudah ada kesepakatan bersama terkait relokasi dan jenis ganti rugi bagi warga Baloi Kolam. Termasuk, soal kaveling serta jumlah ganti rugi untuk warga kelak.

"Apa yang disampaikan pak wali merupakan pembicaraan bersama dengan BP Batam," kata Lukita usai acara Turnamen Futsal Piala Bergilir Kepala BP Batam Minggu (4/3) lalu.

Dengan demikian, ia memastikan yang disampaikan Rudi terkait relokasi warga Baloi Kolam merupakan keputusan bersama. Kini, BP Batam tengah fokus membicarakan pembangunan lokasi eks hutan lindung itu.

"Kami bicarakan dengan pengusahanya bagaimana menjadikan tempat itu *landmark*-nya Kota Batam," imbuhnya.

Pemberian Kaveling Masih Logis

Anggota DPRD Batam dari Komisi I, Fauzan mengatakan rencana pemberian kaveling bagi warga ruli Baloi Kolam sebagai ganti rugi masih layak dan logis.

"Saya katakan lahan itu masih ada. Asalkan lahan tersebut tak hanya ditempatkan satu wilayah, tapi tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Batam," ujar politikus PKB ini.

Terlebih, kata dia, sudah ada pembicaraan antara Pemko Batam dengan BP Batam terkait kesepakatan untuk itu.

"BP Batam melalui Kepala BP Batam kan sudah menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan lahan itu. Kalau otoritas pemegang HPL sudah menyatakan ada untuk lahan itu, saya yakin pasti ada," terangnya. (adi/gas/rna)

Pemko Minta Peralihan Dipercepat

BATAM (BP) - Pemerintah Kota (Pemko) Batam berharap peralihan aset dari Badan Pengusahaan (BP) Batam dapat dipercepat. Setidaknya, setelah verifikasi tim dari Kementerian Keuangan dan Staf Kepresidenan.

"Biar cepat kami tindaklanjuti," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin, Kamis (19/4) siang.

Ia mengatakan, kejelasan status aset-aset tersebut menjadi milik Pemko Batam akan mempermudah penyertaan anggaran. Jika aset-aset tersebut kelak diperbaiki, juga mempermudah penyertaan anggaran pemeliharanya. Saat ini, karena statusnya masih dikelola BP Batam, penyertaan anggaran tidak bisa dilakukan.

"TPA Telagapunggur salah satunya, supaya bisa kita bangun dengan baik. Begitupun pasar induk dan masjid bisa lakukan perbaikan. Kan dasar anggaran bisa keluar kalau memang sudah jadi aset Pemko, kalau belum tak bisa dianggarkan," papar mantan Kepala Dinas Pendapatan Kota Batam ini.

Tim verifikasi dari Kementerian Keuangan dan Staf Kepresidenan rencananya akan melakukan cek fisik empat aset, Jumat (20/4) hari ini. Keempat aset yang akan dicek, yakni Masjid Baiturrahman Sekupang, Masjid Raya Batam, TPA Punggur dan Pasar Induk Jodoh.

Pengecekan hanya dilakukan sehari. Setelah itu tim akan kembali ke Jakarta untuk melaporkan hasilnya ke Kementerian Keuangan dan Presiden Joko Widodo. Persetujuan presiden penting karena aset-aset tersebut nilainya lebih dari Rp 10 miliar.

Selain agenda cek fisik aset yang akan diserahkan ke Pemko Batam ini, tim pusat diperkirakan akan bersilaturahmi dengan jajaran Pemko Batam di kantor Wali Kota Batam.

"Cek fisik aset itu ada tim Pemko Batam juga yang menemani," pungkasnya. (adi)

PEGAWAI Kecamatan Lubukbaja membagikan e-KTP yang telah selesai dicetak, Senin (16/4). Saat ini, Disdukcapil Kota Batam kembali mendapatkan tambahan 16 ribu blangko.

Cetak e-KTP Paling Lama 14 Hari

SEKUPANG (BP) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam mendapatkan tambahan 16 ribu keping blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kamis (20/4).

Kepala Disdukcapil Batam Said Khaidar mengatakan, penyelesaian pencetakan e-KTP akan rampung hingga akhir bulan ini. Jadwal ini lebih cepat dari target sebelumnya, yakni Mei.

"Pertengahan tahun tak ada lagi e-KTP lama tak tercetak," kata Said saat dijumpai di kantornya, kemarin.

Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pembuatan e-KTP saat ini sudah mulai mendapatkan pelayanan normal, yakni paling lambat 14 hari kerja.

"Dokumen sesuai pencetakan bisa saja diproses lebih cepat sesuai arahan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," ujarnya.

Sebanyak 16 ribu keping blanko e-KTP tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan penumpukan pencetakan yang ada di Kecamatan Sekupang. Sisanya akan didistribusikan ke sembilan kecamatan di mainland (perkotaan, *red*).

Ia menyebutkan sedikitnya 15 ribu lebih pengajuan yang harus diselesaikan dalam seminggu ini. "Paling lambat akhir bulan e-KTP warga Sekupang sudah bisa diambil. Mereka yang mengajukan dari tahun lalu sudah bisa miliki fisiknya akhir bulan ini," tambah mantan Kabag Tata Pemerintahan Kota Batam ini.

Disinggung jatah per kecamatan, Said mengatakan, tergantung kondisi pengajuan di masing-masing kecamatan tersebut. "Kalau habis kami tinggal minta ke pusat. Yang jelas jangan ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan kartu identitas tersebut," tutupnya. (yui)

Buang Sampah Sembarangan Kena Tilang

DLH Turunkan Tim Yustisi

SEKUPANG (BP) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam kembali menurunkan tim yustisi untuk menertibkan warga yang membuang sampah sembarangan di penjuru Kota Batam. Jika kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya, tim ini akan memberikan sanksi tilang.

Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Batam Faisal Novrieco mengatakan, kegiatan penertiban sudah mulai berjalan dari April ini. Tim yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DLH Batam, aparat kepolisian, dan Satpol PP Batam sudah turun ke jalan-jalan.

"Mereka mencari warga yang membuang sampah bukan pada tempatnya," katanya.

Ia menyebutkan, untuk memaksimalkan penertiban, tim yustisi akan turun dua hingga tiga kali seminggu. Target operasi adalah beberapa jalan yang selama ini menjadi tempat warga yang tak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. "Biasanya mereka buang di jalan yang dekat dengan hutan," sebutnya.

Faisal menambahkan langkah ini merupakan upaya Pemko Batam menekan keberadaan



F. DALIL HARAHAP/BATAM POS

WARGA Perumahan Taman Carina, Sunadiah, 57, membuang sampah ke dalam tong sampah di depan rumahnya, Senin (2/1/2017) lalu. DLH Batam menerjunkan Tim Yustisi untuk menertibkan warga yang buang sampah sembarangan.

tempat pembuangan sampah (TPS) liar. "Jika ada satu pelanggaran, maka akan ada lagi pelanggaran yang lain. Untuk mencegah ini makanya kami turun," ujarnya.

Ia menyebutkan, jenis pelanggaran yang banyak dijumpai adalah warga membuang sampah material bangunan di pinggir jalan. Salah satu lokasi yang menjadi tempat mereka membuang sampah sembarangan adalah di dekat Perumahan Sandona dan Tiban Indah di wilayah Sekupang.

"Kemarin ada satu yang kami

tilang di lokasi tersebut. Mobil bak terbuka yang memuat bahan material berencana membuang sampah material di pinggir jalan," sebutnya.

Warga yang kena tilang akan diminta identitas diri seperti KTP dan kemudian diberi surat tilang yang menyatakan dia buang sampah sembarangan. Setelah itu, warga tersebut harus ikut sidang dan kemudian didenda. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. (yui)

Kios Liar Harus Dibongkar

Rekomendasi DPRD ke Pemko Batam

ALFIAN LUMBAN GAOL, Batuaji

PEMBANGUNAN kios liar baru di sekitar pasar seken Aviari, Batuaji dikecam DPRD Kota Batam. Bahkan, Komisi I DPRD Kota Batam merekomendasikan kepada Pemko Batam untuk membongkar kios liar tersebut. "Itu akan segera dibongkar. Jadi, kalau ada masyarakat yang sudah membeli atau menyewa jangan menyesal nantinya," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Harmidi Husein di gedung DPRD Batam, Kamis (19/4).

Ia mengatakan, saat ini

pembangunan kios liar baru tidak diperbolehkan lagi. Ini sesuai dengan kesepakatan dengan Pemko Batam. Harusnya pihak Kecamatan Batuaji ataupun Satpol PP paham mengenai hal tersebut.

"Saya tegaskan, itu ilegal. Kita rekomendasikan untuk segera dibongkar," katanya.

Saat ini, DPRD Kota Batam juga sedang membahas mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima. Direncanakan akan ada sentra pedagang kaki lima di Batam.

"Sekarang masih dibahas. Kita nanti akan menentukan titiknya di mana saja. Yang je-

las, kios liar tersebut harus dibongkar," katanya.

Pantauan *Batam Pos* di lapangan, puluhan kios liar yang dibangun di dekat kantor Kelurahan Buliang ini sudah hampir rampung. Namun, sejauh ini terlihat belum ada pedagang yang menempati. Kios ini per unit disewakan dengan harga Rp 1,2 juta per bulan.

Sekretaris Kelurahan Buliang Yulisbar saat ditemui di ruangannya kemarin mengatakan, pembangunan kios liar tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan pihak kelurahan. Bahkan, pihak kelurahan sudah menyampaikan keberatan atas

pembangunannya.

"Tetapi tidak tahu kenapa (pembangunannya) masih lanjut terus," katanya.

Ditanya mengenai langkah dari pihak kelurahan terkait kios liar tersebut, Yulisbar menolak berkomentar. "Waduh, kami sudah diinstruksikan Pak Camat tak boleh komentar terkait itu. Langsung tanya ke pak camat saja," katanya.

Camat Batuaji Ridwan mengatakan pembangunan kios liar di sekitar pasar seken Aviari itu ilegal. Ia mengaku sudah meminta pengelola untuk menghentikannya. "Kami juga sudah kirim surat agar itu dibongkar. Itu adalah ruang terbuka hijau dan tidak boleh di sana ada kios liar," katanya.***

F. DALIL HARAHAP/BATAM POS

Harmidi Husein

Depot Lohan